(Tokyo-Jepang) Kementerian Pertahanan Jepang dan Badan Intelijen terkait lainnya meninjau ulang cara pengumpulan informasi intelijen, setelah gagal mengetahui kematian pemimpin Korea Utara Kim Jong Ill sebelum diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Korea Utara, ungkap stasiun televisi pemerintah NHK Kamis (29/12).

Pengumuman meninggalnya Kim Jong Ill disampaikan pertama kali melalui siaran khusus di radio milik pemerintah Korea Utara pada tanggal 19 Desember. Namun saat itu staf di Kementerian Pertahanan memperkirakan berbagai kemungkinan alasan siaran khusus itu, seperti peluncuran rudal atau pengujian nuklir, namun gagal mengklarifikasi mengenai kematian Kim Jong Ill.

Pandangan bahwa siaran khusus itu bukanlah mengenai kematian Kim Jong Ill menyebar dikalangan staf intelijen Kabinet, dan Polisi, setelah Badan Intelijen Korea Selatan menolak kabar meninggalnya pemimpin Korea Utara itu.

Selain itu tidak ada satu pun badan intelijen terkait, termasuk Kementerian Pertahanan, Kepolisian Nasional, dan Badan Intelijen Keamanan Publik (PSIA), dapat memastikan kematian Kim Jong Ill.

Omori Yoshio, Mantan Kepala Kantor Riset dan Intelijen Kabinet (Nai Cho/CIRO) menjelaskan, Jepang tidak memiliki staf intelijen yang memadai, dan lebih bertindak sebagai mengobati gejala penyakit, bukannya mengidentifikasi penyebab penyakit.

Menurut Omori, Jepang seharusnya menambah jumlah staf, dan alokasi anggaran untuk mengkaji situasi masa depan di Asia Timur Laut.

Omori menjabat posisi Kepala Nai Cho/CIRO saat Kim Ill Sung, Presiden pertama Korea Utara, meninggal di tahun 1994. (NHK)